

SKRIPSI

**MANAJEMEN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DI
DESA BUGIS KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA**

***MANAGEMENT OF FISH AUCTION PLACES IN BUGIS VILLAGE,
SAPE DISTRICT, BIMA REGENCY***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH :

SUSANTI
217110024

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan dan diajukan untuk disidangkan pada Program Studi Administrasi Publik pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Juli 2021

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I

Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si
NIDN 0815118302

Dosen Pembimbing II

Rohana, S.IP, M.IP
NIDN 0831128508

Mengetahui

Ketua Program Studi

Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP
NIDN. 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
MANAJEMEN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DI DESA
BUGIS KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA

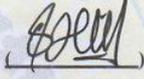
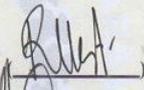
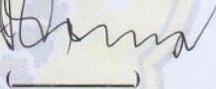
Disusun dan Diajukan Oleh

SUSANTI
NIM. 217110024

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Telah dipertanggung jawabkan di depan penguji dalam ujian skripsi pada tanggal 21
Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos., M.Si.** (PU) 
NIDN. 0815118302
2. **Rohana, S.IP., M.IP.** (PP) 
NIDN. 0831128508
3. **Drs. H. Abdurrahman, MM.** (PN) 
NIDN. 0804116101

Ketua Program Studi Administrasi Publik


Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.
NIDN. 0822048901

Metgetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : Susanti
NIM : 217110024
Alamat : Poja Kec. Sape Kab. Bima

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (Sarjana) dibatalkan,serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 16 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



217110024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susanti
 NIM : 217110029
 Tempat/Tgl Lahir : PaJa Sape, 01 Desember 1995
 Program Studi : Adm. publik
 Fakultas : FISI.POL
 No. Hp : 085 333 770 622
 Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Manajemen pengelolaan Tempat peledangan Ikan di Desa Bugis, Kecamatan Sape Kabupaten Bima

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 23-09.....2021
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



NIM. 217110029



Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Susanti*
 NIM : *217110029*
 Tempat/Tgl Lahir : *POJA Sape, 01 Desember 1995*
 Program Studi : *Adm. publik*
 Fakultas : *FISIPOL*
 No. Hp/Email : *085 333 790 622*
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Manajemen pengelolaan Tempat pelelangan Ikan di Desa Bugis Kecamatan Sape, Kabupaten Bima

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, *23-09*.....2021

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



NIM. *217110029*



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO

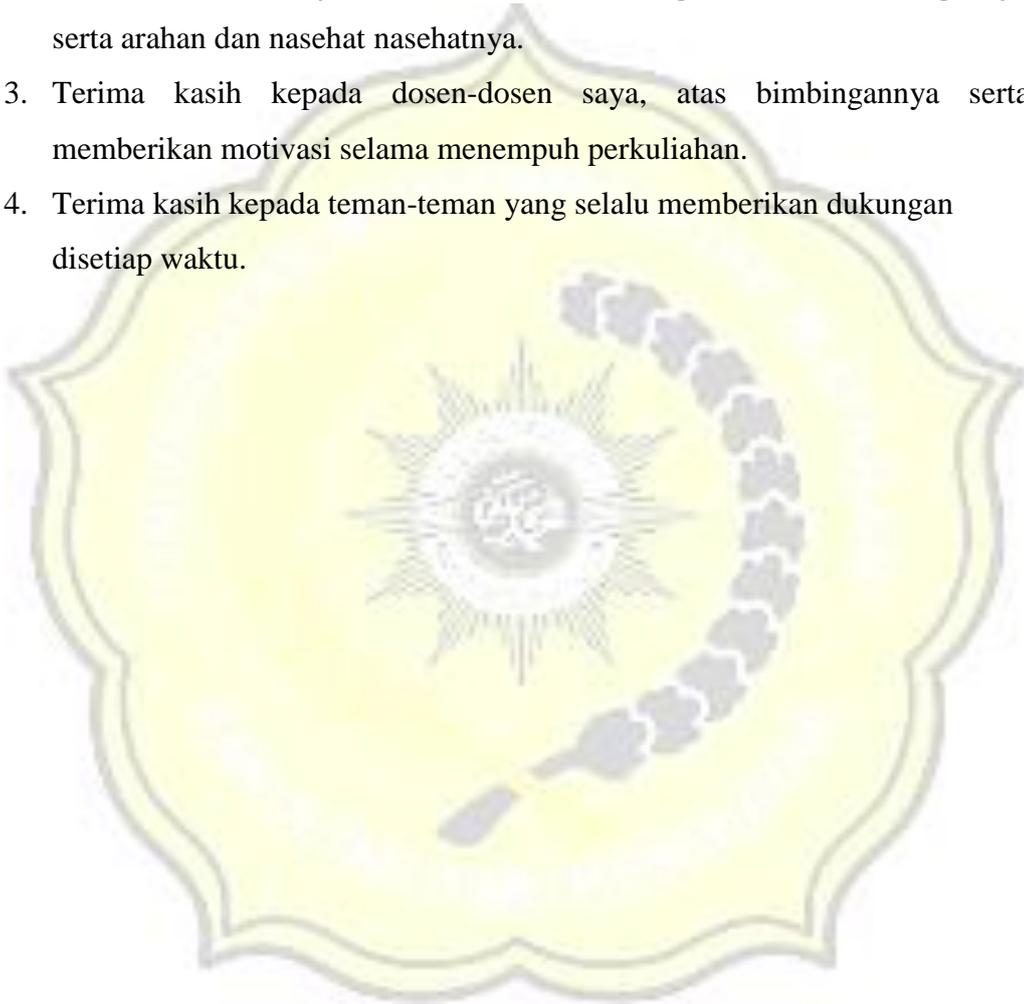
*“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan,
Istiqomah dalam menghadapi cobaan”.*

YAKIN, IKHLAS, DAN ISTIQOMAH.



HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Ucapan syukur dan terimakasih untuk allah ku yang tak henti-henti memberikan petunjuk dan memberikan kelancaran atas terselesaikannya skripsi saya.
2. Terimakasih untuk ayah dan ibu tercinta atas segala do'a dan dukungannya serta arahan dan nasehat nasehatnya.
3. Terima kasih kepada dosen-dosen saya, atas bimbingannya serta memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu memberikan dukungan disetiap waktu.



KATA PENGANTAR

Puji tuhan telah memberikan rahmat dan Ridho-Nya, sehingga skripsi **“Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima”** ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini mengkaji tentang manajemen pengelolaan tempat pelelangan ikan yang terdapat pada Tempat Pelelangan Ikan di Desa Bugis. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (SI) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik FISIPOL Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si selaku dosen pembimbing pertama yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Rohana, S.IP, M.IP selaku dosen pembimbing kedua yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, yang telah membantu serta memotivasi kepada penulis selama belajar di Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Kedua orang tua saya yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Sahabat dan rekan seperjuangan yang tiada henti memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang turut berpartisipasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik konstruktif sangat diharapkan penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan dunia manajemen.

Mataram, 16 Agustus 2021

Penulis

Susanti

ABSTRAK

Susanti, 2021. Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si
Pembimbing II : Rohana, S.IP, M.IP

Latar belakang Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah salah satunya adalah ikan. Pada penelitian ini mengkaji mengenai manajemen pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Bugis. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu; 1) Bagaimana Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima; 2) Kendala apa saja dalam Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima; 2) Untuk mengetahui kendala apa saja dalam Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Bugis di Kabupaten Bima, belum berjalan dengan baik. Kesimpulan penelitian tidak adanya SOP yang tertulis, kurangnya kerja sama antar lini dan sarana yang masih belum memadai, tidak tercapainya target retribusi dan lemahnya pengawasan serta tidak ada sanksi tegas kepada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ilegal. Saran penelitian ini yaitu perlu upaya meningkatkan kordinasi antara tempat pelelangan ikan di Desa Bugis dari UPT PPI/TPI Sape dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.

Kata Kunci : Manajemen, Pengelolaan, Tempat Pelelangan Ikan.

ABSTRACT

Susanti, 2021. Management of Fish Auction Center in Bugis Village, Sape District, Bima Regency. Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

Consultant I : Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si

Consultant II : Rohana, S.IP, M.IP

Indonesia is an archipelagic country with a wealth of maritime resources, including fish. The management of the Fish Auction Center in Bugis Village is investigated in this study. 1) How is the management of the Fish Auction center in Bugis Village, Sape District, Bima Regency; 2) What are the hurdles in the management of the Fish Auction center are the formulations of the problem that will be researched. The goals of this research are to determine how the management of a Fish Auction Center operates and what difficulties exist in that management. A descriptive method with a qualitative approach was used. Data reduction, data display, and conclusion drafting and verification are all part of the data analysis used in this study. The findings revealed that the management of the Bugis Fish Auction Center was ineffective. The investigation found that there is no documented SOP, there is a lack of coordination across lines and inadequate facilities, the retribution target is not met, there is weak supervision, and there are no strong sanctions against illegal Fish Auction Centers. The findings of this study suggest that efforts should be made to strengthen coordination between UPT PPI/TPI Sape and the Department of Maritime Affairs and Fisheries of Bima Regency's fish auction center in Bugis Village.

Keywords: Management, Management, Fish Auction Place.



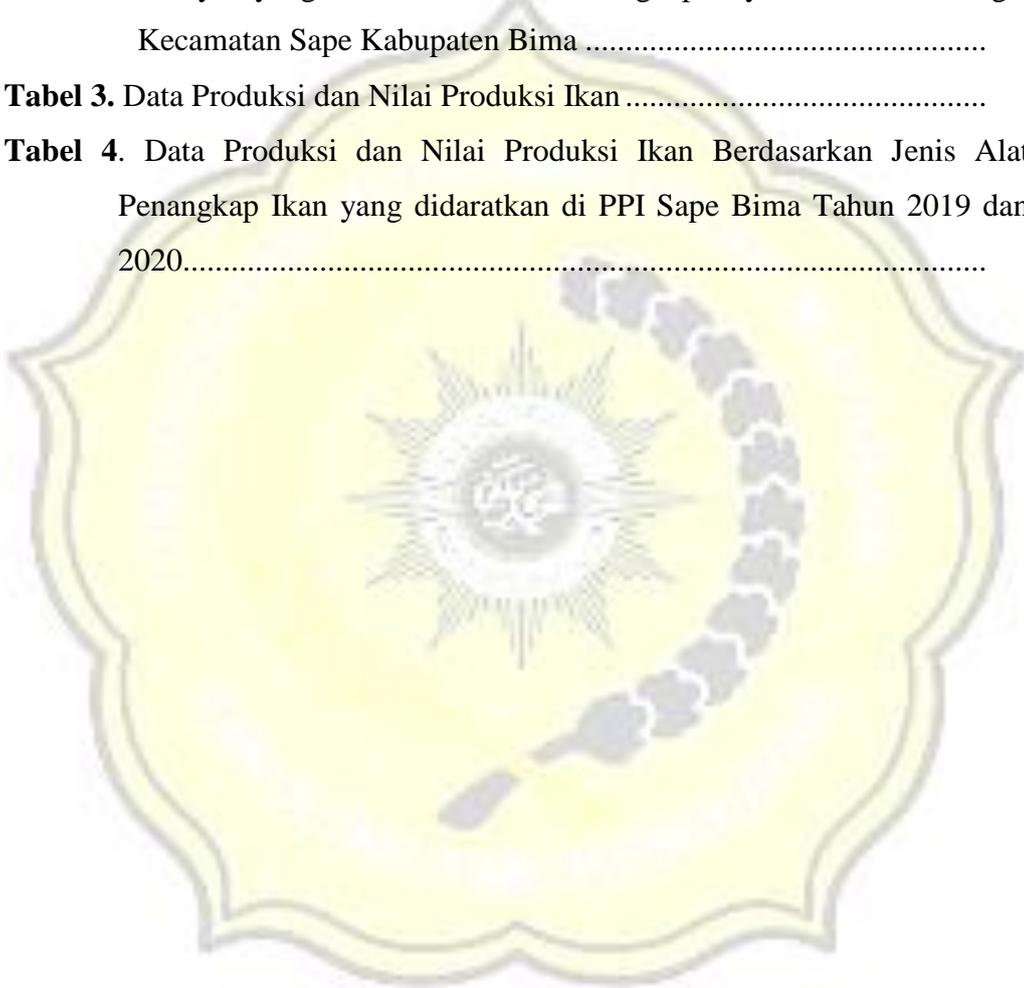
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Penelitian Relevan	14
2.2 Pengertian Administrasi.....	13
2.3 Definisi Manajemen.....	18
2.4 Definisi Pengelolaan	29
2.5 Definisi Nelayan	35
2.6 Kerangka Berpikir.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian.....	48

3.2 Lokasi Peneliatian	49
3.3 Instrumen Penelitian	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.5 Sumber dan Jenis Data.....	50
3.6 Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	56
4.1.2 Letak TPI Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima	56
4.1.2 Bagan : Struktur Organisasi UPT/TPI Desa Bugis	71
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	72
4.2.1 Manajemen Pengelolaan TPI di Desa Bugis.....	77
4.2.2 Kendala pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	111
BAB V KESIMPULAN	119
5.1 Kesimpulan	119
5.2 Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Armada/kapal Perikanan yang dilayani di TPI Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima	59
Tabel 2. Jenis dan jumlah Alat Penangkapan Ikan yang dioperasikan oleh Nelayan yang Mendaratkan Hasil Tangkapannya di TPI Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima	60
Tabel 3. Data Produksi dan Nilai Produksi Ikan	62
Tabel 4. Data Produksi dan Nilai Produksi Ikan Berdasarkan Jenis Alat Penangkap Ikan yang didaratkan di PPI Sape Bima Tahun 2019 dan 2020.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut perairan. Indonesia merupakan Negara dengan bentuk kepulauan mempunyai lebih dari 17,5 ribu buah pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. keseluruhan wilayah Indonesia terdiri dari perairan dan juga daratan yang mengandung potensi sumber daya yang melimpah dan tersebar diseluruh Indonesia. Melihat luasnya wilayah yang ada, setelah reformasi, Indonesia yang mengusung pemerintahan sentralisasi pada rezim sebelumnya berganti arah menjadi sistem yang tersentralisasi agar bisa menjangkau semua kalangan masyarakat disetiap daerahnya. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjadi landasan sistem desentralisasi merupakan baru dalam tata kelola pemerintahan, dengan adanya Undang-Undang tersebut pemerintah bisa dikatakan menjadi lebih dekat dan lebih mengetahui permasalahan yang ada didaerah serta aspirasi dari masyarakat melalui pemerintah daerah. (Bappenas, diakses 16 Februari 2019).

Di Indonesia, pembangunan perikanan dan kelautan seolah menghadapi dilema. Di satu sisi, kita dihadapkan pada sumber daya perikanan dan kelautan yang kaya dan mampu menghasilkan potensi ekonomi yang tidak sedikit. Tetapi kenyataannya, di sisi lain, potensi

tersebut belum juga mampu meningkatkan ekonomi para pelakunya secara signifikan (Akhmad Fauzi, 2005).

Nelayan merupakan kelompok sosial yang selama ini terpinggirkan, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Nelayan di Indonesia masih belum berdaya secara ekonomi dan politik. Organisasi ekonomi nelayan belum solid, nelayan masih terikat pada ikatan tradisional dengan para tengkulak dan belum ada institusi yang bisa menjamin kehidupan nelayan selain insitusi patron klien tersebut. Secara politik pun, masyarakat nelayan masih dijadikan obyek mobilisasi politik maupun pemerintah, sehingga ketika nelayan menjadi korban pembangunan pun mereka tidak dapat berbuat apa-apa (Mulyadi, 2005:7).

Terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan, serta pengembangan SDM dan kelompok nelayan dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan Undang-undang ini, disebutkan pula bahwa pemerintah berkewajiban untuk membangun dan membina prasarana perikanan (pelabuhan perikanan dan saluran irigasi tambak). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan.

Ditjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan RI telah melaksanakan Proyek *CO-Fish (Coastal Community Development and*

Fisheries Resources Management) di lima lokasi di seluruh Indonesia, yaitu kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Trenggalek dan Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat. Pada masing-masing lokasi pengelolaan proyek dilaksanakan oleh *Project Implementation Unit* (PIU).

Banyak kajian telah membuktikan bahwa tekanan kemiskinan struktural yang melanda kehidupan nelayan tradisional sesungguhnya disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks (Suyanto dalam Suhartini, 2005). Faktor-faktor itu tidak saja hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal, akses dan jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan atau revolusi biru yang mendorong terjadinya pengurasan sumber daya laut secara berlebihan.

Keterbatasan sosial lebih terwujud pada ketidakmampuan masyarakat nelayan dalam mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar secara menguntungkan yang ditunjukkan oleh lemahnya mereka dalam mengembangkan organisasi ke luar lingkungan kerabat mereka atau komunitas lokal. Karena itulah mereka mengalami nasib terpinggirkan (marginal) dari proses kemajuan. Keterbatasan politik dari masyarakat nelayan terwujud dalam tidak dilibatkannya mereka untuk berpartisipasi

secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, walaupun ini untuk kepentingan mereka sendiri.

Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan dua unsur yang terkait dalam mengatur pemasaran hasil tangkapan nelayan. Mereka adalah bagian dari sistem kelembagaan dalam perikanan yang turut menentukan kesejahteraan nelayan. Proses peningkatan keberdayaan nelayan menuntut peran mereka dalam mengelola sumberdaya perikanan. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat.

Sebagai provinsi kepulauan, Nusa Tenggara Barat memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup besar. Dengan luas perairan laut sebesar 29.159,04 km² (59,13 %) yang lebih luas dari wilayah daratannya yang sebesar 20.153,15 km² (40,87 %), Provinsi NTB mempunyai ekosistem perairan yang terbilang lengkap seperti perairan laut pelagis, laut demersal, ekosistem pesisiran pulau-pulau kecil yang kaya akan terumbu karang, padang lamun, mangrove hingga perairan umum seperti waduk, danau, sungai dan embung yang berlimpah sumberdaya perikanan dan kelautan. Oleh karenanya di Provinsi NTB dapat dikembangkan kegiatan perikanan tangkap di laut dan perairan umum; perikanan budidaya laut, air payau dan air tawar, pengolahan produk hasil

perikanan dan kelautan, tambak garam, konservasi dan wisata bahari, hingga pemanfaatan sumberdaya laut dalam sebagai bahan kosmetik, obat-obatan maupun industri. (Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, diakses 22 Desember 2020).

Pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan salah satu isinya yaitu bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah Tuhan Yang Maha Esa yang diamatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

“Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil salah satu isinya yaitu bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pengelolaan

Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat”.

Luas area penangkapan ikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 29.159 Km² dengan potensi produksi sebesar 185.518 ton (129.863 ton) per tahun merupakan data potensi yang dihitung dalam kewenangan pengelolaan 12 mil laut termasuk perairan teluk-teluk dan selat-selat yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Lokasi penangkapan meliputi perairan laut Flores, Samudra Hindia, Selat Alas, Selat Lombok dan Selat Sape. Jenis hasil tangkapan yang lebih dominan antara lain ikan cakalang, tongkol, tuna, cumi-cumi, ikan ekor kuning, ikan hiu botol, udang dan ikan hias. Potensi lestari perikanan di Provinsi NTB sekitar 129.863,0 ton/th, yang terdiri dari perairan pantai sebesar 67.906 ton/th, perairan lepas pantai sekitar 61.957 ton/th dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 298.576 ton/th. Secara lengkap luas areal dan potensi sumberdaya perikanan tangkap diperairan Provinsi NTB. Produksi perikanan tangkap dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terjadi fluktuasi, dimana pada tahun 2018 produksi tangkapan ikan mengalami kenaikan secara signifikan yaitu sebesar 59,8%. Namun pada tahun-tahun berikutnya produksi cenderung menurun yaitu sebesar 14,1%. Sedangkan pada tahun 2020 produksi tangkapan meningkat sebesar 8,8 persen. Secara umum, produksi perikanan

tangkap di NTB cenderung stabil. (Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, diakses 22 Desember 2020).

Produksi jenis ikan dari hasil tangkapan Tahun 2017-2019 Strategi pemberdayaan yang dikembangkan di masyarakat pesisir Kecamatan Sape Kabupaten Bima adalah dengan diperlakukannya masyarakat sebagai subyek pemberdayaan; kegiatan yang dilakukan bersifat non fisik; kegiatan pemberdayaan berbasis kelembagaan sosial ekonomi, kerakyatan serta bertujuan memperkuat eksistensi kelembagaan organisasi sosial; bersifat berkelanjutan; didukung oleh jaringan kemitraan yang luas, dimana perlu dukungan kebijakan dan fasilitas dari pemerintah, partisipasi pihak swasta, keterlibatan perbankan dan kontribusi dari pihak lain yang peduli pada pembangunan masyarakat di kawasan pesisir. Desa Bugis adalah sudut pandang terbaik untuk mengenal Teluk Sape. Inilah lanskap yang paling sibuk: menjalin aktivitas pelayaran di bagian utara, perikanan di tengah, dan potensi geologi delta di Selatan. (Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, diakses 22 Desember 2020).

Desa Bugis sebagian penduduknya fasih berbahasa Bugis-Sulawesi, yang cukup menunjukkan asal-muasal mereka. Tak jelas benar kapan para pelaut seberang itu berdatangan ke sini, yang pasti, Desa Bugis kemudian menjadi pemukiman nelayan terbesar di Bima dari 3.000-an penduduk usia produktif, antara 21-55 tahun, lebih separuhnya mengandalkan laut untuk mata pencahariannya, itulah kenapa Desa Bugis tak pernah sepi dari

aktivitas melaut. Pada saat beraktivitas bukannya tidak ada masalah, nelayan umumnya hanya menguasai satu jenis alat tangkap, kemampuan menggunakan alat tangkap itu diwarisi secara tradisional, turun temurun. Karena itu biasanya mereka terdiri dari beberapa kelompok.

Pada dasarnya sistem dari TPI adalah suatu pasar dengan sistem perantara (dalam hal ini adalah tukang tawar) melalui penawaran umum dan yang berhak mendapatkan ikan yang dilelang tersebut adalah penawar tertinggi. Tujuan pendirian TPI yang semula didirikan semata-mata hanya untuk kepentingan nelayan dan koperasi perikanan dengan tujuan untuk melepaskan dari kemiskinan, semakin berkembang menjadi sarana untuk memungut retribusi oleh pemda Tingkat I, Tingkat II, dan sebagainya. TPI sebagai salah satu unit kegiatan ekonomi yang potensial dalam menunjang PAD melalui sumbangan retribusinya. Setelah melakukan observasi awal di tempat pelelangan ikan di Desa Bugis peneliti menemukan berbagai masalah terkait dengan manajemen pengelolaan tempat pelelangan ikan di Desa Bugis.

Pertama, dari segi teknis perencanaan belum adanya standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara spesifik mengatur teknis pengelolaan tempat pelelangan ikan, oleh karena itu penarikan retribusi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan daerah yang telah ada. Jika dalam Perda retribusi dipungut sebesar 4% namun dalam pelaksanaannya di sejumlah tempat pelelangan ikan berbeda. Hal ini

dipertegas oleh Manajer tempat pelelangan ikan Desa Bugis dalam wawancara peneliti pada Kamis 28 Januari 2021 pukul 09:25 menyatakan: Retribusi di tempat pelelangan ikan Desa Bugis sebesar 6%, 4 disetorkan ke pemerintah daerah Kabupaten, sedangkan menurut kepala UPT Dinas Kelautan dan perikanan dalam wawancara peneliti pada Jum'at 29 Januari 2021, pukul 14:00 yang menyatakan: untuk penarikan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan kesepakatan bersama antara tempat pelelangan ikan, nelayan dan bakul ikan. Di Tempat Pelelangan Ikan Labuan 2 jumlah retribusi yang diambil sebesar 8% ,4% disetorkan ke pemerintah daerah, 2% untuk operasional pegawai tempat pelelangan dan 2% untuk dana simpanan nelayan.

Kedua, dari segi pengorganisasian tempat pelelangan ikan Desa Bugis terkendala dengan sarana dan prasarana yang ada, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah alat tangkap yang mengakibatkan nelayan tidak bisa menangkap ikan dengan baik, hal ini dijelaskan oleh Manajer tempat pelelangan ikan Desa Bugis dalam wawancara peneliti pada Sabtu 30 Februari 2021, pukul 09:30 yang menyatakan: Tempat Pelelangan Ikan Desa Bugis mengalami kesulitan seperti alat tangkap ikan jadi nelayan sulit melakukan aktivitas melaut. Selain terkendala sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan Desa Bugis juga terkendala oleh anggaran, anggaran adalah sejumlah uang yang digunakan untuk melaksanakan suatu program yang akan dilaksanakan. Dalam manajemen pengelolaan tempat pelelangan

ikan anggaran bersifat sangat penting, anggaran ini digunakan untuk modal membeli ikan ke nelayan atau juragan ikan sebagai sebagai dana operasional tempat pelelangan ikan (gaji pegawai tempat pelelangan ikan, perawatan fasilitas). Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah pemerintah daerah tidak memberikan anggaran untuk kegiatan pelelangan ikan, tempat pelelangan ikan mencari sendiri anggaran yang akan digunakan sebagai modal membeli ikan juga biaya operasional tempat pelelangan ikan. Anggaran ikan didapat dari pemungutan retribusi pelelangan ikan sebesar 2%.

Ketiga, pelaksanaan juga menjadi masalah yang peneliti temukan dari observasi yang peneliti lakukan, pelaksanaan disini terkait pada target pengumpulan atau penarikan retribusi. Pada tahun 2019 ini tempat pelelangan ikan memiliki target retribusi sebesar Rp. 115,775,000 Target ini ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima, namun pengumpulan atau penarikan retribusi di tempat pelelangan ikan Desa Bugis masih jauh dari target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Hal ini di jeleskan oleh manajer tempat pelelangan ikan dalam wawancara peneliti pada Senin 1 Februari 2021, pukul 09:30 yang menyatakan: target yang diberikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bima ke tempat pelelangan ikan Desa Bugis adalah sebesar Rp. 115,775,000 tapi dalam pelaksanaanya tempat pelelangan ikan Desa Bugis belum bisa memenuhi target yang diberikan, pada tahun 2019 tempat

pelelangan ikan Desa Bugis hanya mengumpulkan retribusi sebesar Rp 41.127.016 dan pada tahun 2020 (Januari-Juni) tempat pelelangan ikan Desa Bugis baru mengumpulkan retribusi sebesar Rp. 12.053.166.

Keempat, terkait fungsi pengendalian, di Desa Bugis ada tempat pelelangan ikan yang dibangun oleh pemerintah daerah (resmi) ada juga tempat pelelangan ikan yang dibangun oleh juragan nelayan (pelelangan ilegal), pelelangan ilegal ini mengalihkan sebagian besar proses lelang ikan yang harusnya dilakukan pada tempat pelelangan ikan Desa Bugis yang dibangun oleh pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pemerintah daerah, karena nelayan tidak melakukan kewajiban membayar retribusi sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 4% dari hasil raman (=nilai transaksi lelang) melainkan hanya Rp. 150.000 per sekali bongkar ikan. Nilai Rp. 150.000 muncul dari proses musyawarah antara juragan nelayan dengan pihak pengelola tempat pelelangan ikan yang resmi. Hal ini di jelaskan oleh Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan dalam wawancara peneliti pada hari Rabu 3 Februari 2021, pukul 14:00 yang menyatakan: Retribusi ditentukan dari kesepakatan bersama antara tempat pelelangan ikan bersama juragan nelayan, nelayan dan dan bakul ikan. Dalam hal ini pemerintah daerah kurang berupaya untuk menertibkan tempat pelelangan ikan yang dibangun oleh juragan nelayan (ilegal) atau memberikan sanksi kepada nelayan yang tidak membayar kewajiban retribusinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan suatu kajian yang mendalam terhadap efisiensi Tempat Pelelangan Ikan, tingkat keberdayaan pengelola TPI untuk mendapatkan suatu strategi pemberdayaan yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam melakukan perbaikan kinerja dan efisiensi pelelangan ikan yang dapat mensejahterakan masyarakat nelayan dan pengelolanya. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima?
2. Kendala apa saja dalam Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi dan pemecahan permasalahan administrasi khususnya mengenai “Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima” dan dapat digunakan sebagai dasar atau referensi dalam melakukan penelitian sejenisnya.

1.4.2 Secara praktis

1) Bagi Peneliti

Seluruh rangkaian kegiatan dari penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muihammadiyah Mataram.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan sebagai acuan bagi *civitas akademika*.

3) Bagi Pengelola Tempat Pelelangan Ikan di Desa Bugis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan kinerja aparatur dan fasilitas tempat pelelangan ikan sehingga menjadikan tempat pelelangan ikan tersebut kembali optimal.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa penelitian yang pernah penulis baca diantaranya:

No	Nama/Tahun/Judul	Motode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Fifi Dewi Resti (2012) “Pengukuran Kinerja Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di PPI Muara Angke”.	Metode Kualitatif	Adapun hasil dari penelitian dari penelitian pengukuran kinerja pengelolaan tempat pelelangan ikan di PPI Muara Angke sudah dikelola oleh seksi pelelangan serta Koperasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini memiliki tujuan yang sama dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu ingin mengetahui atau mendeskripsikan pengelolaan tempat pelelangan ikan. • Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah pada teori, sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan hanya menggunakan satu teori saja yaitu teori

				fungsi manajemen POAC (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>) dari G.R. Terry.
2	Sandi Hertono dkk (2013) “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara”.	Metode Kualitatif	Adapun hasil dari penelitian “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara” menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Jepara belum dapat dikatakan optimal karena masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk meminimalisir keadaan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah fokus penelitian adalah tempat pelelangan ikan, juga metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. • perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah <i>locus</i> penelitian, jurnal ilmiah ini dilakukan di Kabupaten Jepara sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Bima.
3	Bustani Mahyuddin (2001) “Peranan TPI Sebagai Tempat Untuk Menjual Hasil	Metode Kualitatif	Dari hasil penelitian di dapat bahwa kondisi manajemen KUD belum baik, SDM pengurus masih rendah tingkat	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang sedang peneliti lakukan adalah fokus penelitian adalah tempat pelelangan

Tangkapan Nelayan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu". (2001)	pendidikannya dan kurang luas pengetahuan dan pengalamannya, sikap dan perilaku pengurus yang kurang disenangi anggotanya, modal KUD yang belum memadai sehingga mengakibatkan KUD tidak mengakar dalam alam nelayan setempat, untuk selanjutnya pelelangan ikan tidak dapat dijalankan yang mengakibatkan nilai jual yang seharusnya besar, namun hasil yang didapatkan kecil.	ikan. • Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah pada teori juga tempat penelitian.
--	---	--

2.2 Pengertian Administrasi Publik

2.2.1 Pengertian Dasar Administrasi dan Publik

Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis ke dalam bentuk pembukuan. Administrasi di sini sama dengan pencatatan segala kegiatan organisasi yang akan dijadikan bahan informasi bagi seluruh komponen organisasi yang bersangkutan. ini berarti, erat kaitannya dengan kesekretariatan.

Pendapat bahwa kata administrasi berasal dari kata *administration* (bahasa Inggris) yang bentuk infinitifnya *to administer*, artinya *to manage* (mengelola) *to direct* (menggerakkan), merupakan pengertian yang luas sebagaimana diartikan oleh Leonard D. White. Seowarno mendefinisikan bahwa administrasi adalah suatu yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, Negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau yang kecil, dan sebagainya.

Herbaert A. Simon dalam Sugandha Dan Handyaningrat mendefinisikan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan dari kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama. Simon memberikan contoh, seandainya ada dua orang yang bersama-sama menindahkan batu yang tidak mungkin dipindahkan oleh seorang diri saja, perbuatan kedua orang tersebut sudah dapat dikatakan bahwa administrasi. Jhon M. Pfiffner dalam Sugandha mengatakan bahwa administrasi adalah suatu proses yang terutama bersangkutan dengan alat-alat untuk menyelenggarakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Dr. H.M. Anton Athoillah, M.M, 2017: 132-133).

Administrasi dalam arti luas, seperti yang dikembangkan oleh para tokoh teori administrasi maupun yang dikembangkan di dunia pendidikan tinggi dewasa ini, seperti yang ditelaah dalam Fakultas Ilmu Administrasi. Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang

diinginkan. (Ulbert Silalahi, 2005). Jadi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu disebut administrasi dalam arti luas.

Publik berarti umum, masyarakat atau negara. Yang didefinisikan sebagai “umum” misalnya milik umum, tempat umum, perusahaan umum, dan lain-lain yang sifatnya untuk umum. Dan yang didefinisikan “masyarakat” misalnya hubungan masyarakat, pelayanan masyarakat, kepentingan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian yang didefinisikan “Negara” misalnya otoritas negara, gedung negara, keuangan negara, dan lain sebagainya.

Sedangkan arti dari publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. (Inu Kencana Syafie, 2006: 18)

2.2.2 Pengertian Administrasi Publik

Dari pengertian atau definisi administrasi dan publik tersebut di atas maka dapat ditarik pengertian tentang administrasi publik yang pada intinya melaksanakan pembangunan dan mengurus atau memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Prethus adalah sebagai berikut: Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan Pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.

Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarah kacakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

2.3 Definisi Manajemen

Secara etimologi, *manajement* (di Indonesia diterjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata *manus* (tangan) dan *agree* (melakukan), yang setelah digabung menjadi kata *manage* (bahasa inggris) berarti mengurus arau *managiere* (bahasa latin) yang berarti melatih. Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti kata tersebut, secara substantive, makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Dengan demikian, muncul pertanyaan apa yang dikelola, bagaimana mengelolanya, untuk apa dikelola, dan siapa yang bertindak sebagai pengelola.

Malayu S.P. Hasibuan (2011:1) menjelaskan bahwa manajemen dalam bahasa inggris, artinya *to manage*, yaitu mengatur. Oleh karena itu, menurutnya, pertanyaan yang muncul adalah apa yang diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, bagaimana mengaturnya, dan di mana harus diatur. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjelaskan objek pengelolaan manajemen. Oleh sebab itu, manajemen berkaitan dengan

proses perencanaan, pengorganisaian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang di dalamnya terdapat upaya anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengerahkan sumber daya organisasi yang dimiliki.

Menurut T. Hani Handoko (2003:2), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut G.R Terry (2008: 5) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, waktu dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerjasama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi maka pekerjaan yang berat dan sulit dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan tercapai.

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-

sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam ini terdapat dua system yang harus selalu ada dalam manajemen, yaitu sistem organisasi dan sistem administarsi.

2.2.1 Ruang Lingkup Manajemen

Sebagai ilmu, manajemen memiliki teori dan kerangka berpikir yang sudah teruji, terutama berhubungan dengan teori manajemen ilmiah, organisasi klasik, dan teori perilaku organisasi.

Teori manajemen ilmiah memfokuskan kajiannya pada pentingnya keberadaan dan peran manajer dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut teori manajemen ilmiah, penciptaan iklim yang kondusif bagi perusahaan sangat beruntung pada sumber daya manusia yang menggerakkan perusahaan. Apabila sumber daya manusia lemah, meskipun memiliki modal dan fasilitas yang memadai, perusahaan tidak akan bisa meraih keberhasilan. Agar memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, perusahaan harus melakukan pembagian kerja yang proporsional dan menempatkan para pekerja menurut spesialisasinya masing-masing. Dengan cara ini, setiap pekerja memikul tanggung jawab yang penuh sesuai dengan spesialisasinya dan mengikuti sistem kerja yang profesional.

Manajemen juga mengkaji efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan perusahaan, kegiatan perusahaan yang logis, jumlah sumber daya manusia atau staf

yang memadai, disiplin kerja, upah yang proporsional, bonus yang prestatif, standar pekerjaan yang sistematis, pertanggungjawaban yang objektif, penarapan balas jasa atau insentif yang motivasional, dan pengembangan perusahaan yang terukur.

Teori yang kedua yang dikembangkan oleh manajemen dan sebagai bagian dari ruang lingkup kajiannya, adalah teori organisasi klasik. Teori ini membicarakan tugas manajemen yang pertama kali diperkenalkan oleh Hendry Foyal (1841-1925), yaitu pembahasan mengenai hal-hal berikut:

1. *Technical* : kegiatan memproduksi barang dan pengorganisasian;
2. *Commercial* : kegiatan membeli bahan dan menjual produk;
3. *Financial* : kegiatan pembelajaran;
4. *Security* : kegiatan menjaga keamanan;
5. *Accountancy* : kegiatan akuntansi;
6. *Managerial* : melaksanakan fungsi manajemen.

2.2.2 Pentingnya Manajemen

Pada dasarnya manajemen itu penting karena manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan suatu tindakan. (Hasibuan, 2013) pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab ini.

Maka terbentuklah kerja sama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini maka pekerjaan yang berat dan sulit akan

dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan tercapai. Pada dasarnya manajemen itu penting, sebab:

1. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam menyelesaikannya,
2. Perusahaan akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapkan dengan baik.
3. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan.
4. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan guna semua potensi.
5. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan memanfaatkan 6M dalam proses manajemen tersebut.
6. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan.
7. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur.
8. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.
9. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama sekelompok orang.

Manajemen selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, koperasi, yayasan-yayasan, pemerintah dan lain sebagainya. Dengan manajemen yang baik maka pembinaan kerja sama akan serasi dan harmonis, saling menghormati dan menciantai, sehingga tujuan optimal akan tercapai. Begitu pentingnya peranan manajemen dalam kehidupan manusia mengharuskan kita mempelajari, menghayati, dan menerapkan demi hari esok yang lebih baik.

2.2.3 Tujuan Manajemen

Pada dasarnya setiap aktivitas atau kegiatan selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai (Hasibuan, 2011:17-20). Tujuan individu adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya berupa materi dan materi dan materi dari hasil kerjanya. Tujuan organisasi adalah mendapatkan laba (*business organization*) atau pelayanan/pengabdian (*public organization*) melalui proses manajemen itu. Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana (*plan*), karena itu hendaknya ditetapkan “jelas realistis dan mencakup menantang” untuk di perjuangkan berdasarkan potensi yang dimiliki. Jika tujuannya jelas, realistis dan dan cukup menantang maka usaha-usaha untuk mencapainya cukup besar. Sebaliknya, jika tujuan ditetapkan terlalu mudah atau terlalu muluk maka motivasi untuk mencapainya rendah. Jadi, semangat kerja karyawan akan termotivasi, kalau tujuan ditetapkan jelas, realistis dan cukup menantang untuk dicapainya.

Dalam menetapkan tujuan ini harus didasarkan pada analisis “data, informasi dan potensi” yang dimiliki serta memilihnya dan alternatif-alternatif yang ada. Tujuan organisasi dapat diketahui dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) nya. Tujuan-tujuan ini dapat kita kaji dari fungsi beberapa sudut dan dibedakan sebagai berikut:

1. Menurut tipenya
2. menurut prioritasnya
5. Menurut tingkatnya
6. Menurut bidangnya

3. Menurut jangka waktunya
4. Menurut sifatnya
5. Menurut sifatnya
6. Menurut sifatnya
7. Menurut motifnya

Dari hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan merupakan hal terjadinya proses manajemen dan aktivitas kerja, tujuan beranekamacam tetapi harus ditetapkan secara jelas, realistis dan cukup menantang berdasarkan analisis data, informasi dan memilih alternatif-alternatif yang ada kecakapan manajer dalam menetapkan tujuan dan kemampuannya memanfaatkan peluang mencerminkan tingkat hasil yang dapat dicapainya.

2.2.4 Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan)

Planning berasal dari kata *plan*, artinya rencana, rancangan, maksud, dan niat. *Planning* berarti perencanaan. Perencanaan adalah proses kegiatan, sedangkan rencana merupakan hasil perencanaan. Dalam perencanaan terdapat penentuan-penentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk atau jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Prosedur pelaksanaan kegiatan;
- c. Kebijakan yang dijadikan landasan kegiatan;
- d. Arah dan tujuan yang hendak dicapai;
- e. Personal yang melaksanakan rencana;
- f. Waktu pelaksanaan rencana;
- g. Anggaran biaya yang dibutuhkan. ***Organizing***

Pengorganisasian adalah suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentudan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Dalam pengorganisasian dilakukan hal-hal berikut:

1. Penerimaan fasilitas, perlengkapan, dan staf yang diperlukan untuk melaksanakan rencana.
2. Pengelompokan dan pembagian kerja menjadi struktur organisasi yang teratur.
3. Pembentukan struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi.
4. Penentuan metode kerja dan prosedurnya.
5. Pemilihan, pelatihan, dan pemberian informasi kepada staf.

2. *Coordinating*

Mengkoordinasikan yaitu menyatukan dan menyelerasikan semua kegiatan. Adanya bermacam-macam tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang memerlukan koordinasi dari seorang pemimpin. Adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau kesimpangsiuran dalam tindakan. Dengan adanya koordinasi yang baik, semua bagian dan personal dapat bekerja sama menuju ke satu arah tujuan yang telah ditetapkan.

3. *Controlling*

Pengendalian yakni meneliti dan mengawasi agar semua tugas dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada atau sesuai deskripsi kerja masing-masing personal. Pengendalian dapat dilakukan secara vertical maupun horizontal, yaitu atasan dapat melakukan pengontrolan

kepada bawahannya, demikian pula bawahan dapat melakukan upaya kritik kepada atasannya. Pengendalian terdiri atas:

1. Penelitian terhadap hasil kerja sesuai dengan rencana/program kerja;
2. Pelaporan hasil kerja dan pendapatan berbagai masalah;
3. Evaluasi hasil kerja dan *problem solving*.

Pengawasan adalah suatu kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dan mencapai hasil yang dikehendaki. Langkah-langkah pengawasan adalah:

1. Memeriksa
2. Menginspeksi
3. Mengecek
4. Mencocokkan
5. Mengedalikan
6. Mengatur
7. Mencegah sebelum terjadi kegagalan.

4. *Evaluating*

Mengevaluasi menilai semua kegiatan untuk menemukan indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya. Dirumuskan solusi alternatif yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan meningkatkan kualitas keberhasilan di masa yang akan datang.

5. *Budgeting*

Penyusunan anggaran biaya lembaga membutuhkan pembiayaan yang terencana dengan matang. Untuk itu, *income* yang diperoleh harus

diperhatikan sebelum mengeluarkan dana untuk kegiatan tertentu. Suatu anggaran merupakan rencana penggunaan sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan terpadu.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi pembiayaan ialah:

- a. Perencanaan tentang berapa biaya yang diperlukan;
- b. Sumber biaya yang diperoleh atau diusahakan;
- c. Mekanisme penggunaannya;
- d. Pelaksanaan pembiayaan kegiatan;
- e. Pola pembukuan dan pertanggungjawabannya, serta;
- f. Pengawasan.

6. Actuating

Actuating adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya. Dengan demikian, dalam *actuating* terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penetapan saat awal pelaksanaan rencana kerja;
- b. Pemberian contoh tata cara pelaksanaan kerja dari pimpinan;
- c. Pemberian motivasi para pekerja untuk segera bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- d. Pengomunikasian seluruh arah pekerjaan dengan semua unit kerja;
- e. Pembinaan para pekerja;
- f. Peningkatan mutu dan kulaitas kerja;
- g. Pengawasan kinerja dan moralitas pekerja.

7. Farecasting

Farecasting merupakan kegiatan peramalan termasuk upaya memprediksi berbagai kemungkinan yang akan terjadi setelah pelaksanaan kegiatan-kegiatan meramal memperkirakan biasanya didasarkan pada hasil

pengawasan dan evaluasi sehingga organisasi dapat membuat perencanaan yang lebih baik dan mempersiapkan alternatif yang akan diambil dalam suatu keputusan.

Dengan demikian, kegiatan *forecasting* berkaitan dengan hal-hal:

- a. Mencari kemungkinan yang akan terjadi sehubungan dengan kegiatan yang sedang dilakukan, dengan melihat kinerja organisasi;
- b. Membaca situasi dan kondisi yang belum terjadi dengan mempertimbangkan kebiasaan dan pengalaman di masa lalu, kemudian membuat rencana baru sebagai antisipasi keadaan yang akan datang.

8. Staffing atau Assembling Resources

Staffing atau *assembling resources*, termasuk kegiatan organisasi yang sangat penting karena berhubungan dengan penempatan orang dalam tugas dan kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan penempatan orang berkaitan dengan manajemen personal. Oleh sebab itu, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan jenis pekerjaan;
- b. Penentuan jumlah orang yang dibutuhkan;
- c. Penentuan tenaga ahli;
- d. Penempatan personal sesuai dengan keahliannya;
- e. Penentuan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pegawai;
- f. Pembatasan otoritas dan tanggung jawab pegawai;
- g. Penentuan hubungan antarunit kerja;
- h. Penentuan gaji, upah, dan insentif pegawai yang berkaitan juga dengan bagian keuangan.

- i. Penentuan masa jabatan, mutasi, pension, dan pemberhentian pegawai.

9. *Directing and commanding*

Directing and commanding merupakan kegiatan organisasi yang berhubungan dengan pembinaan dan pelaksanaan instruksional para pemegang jabatan dalam organisasi. Dengan pandangan di atas, *directing* dan *commanding* selalu berhubungan dengan aktivitas seperti usaha pengembangan kelompok kerja (Dr. H.M. Anton Athoillah, M.M, 2017: 110-118).

2.3 Definisi Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi

atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.

Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Marry Parker Follet (19974) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat

- Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Drs. M. Manulang (1990:15-17) dalam bukunya *dasar-dasar manajemen* istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan

yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir isu utamanya adalah masih sangat besarnya jumlah masyarakat yang kurang mampu (penghasilan dibawah standar rata-rata yang ditentukan) dan masih harus menghadapi masalah kesehatan, kekurangan air bersih, abrasi, dan sulitnya mencapai tingkat pendidikan yang layak, hal ini disebabkan belum dikelola dengan baik.

Menurunnya kualitas lingkungan dan daya dukung, sarana dan prasarana terbatas, demikian pula tingkat aksesibilitas dan dana yang tersedia termasuk program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, lingkungan sosial maupun lingkungan alam yang merupakan hal utama dalam menentukan arah pemberdayaan. Konsep pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif efisien secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga masyarakat, negara, regional maupun Internasional, termasuk dalam bidang politik ekonomi, maupun lainnya.

Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena di dalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya: 1) Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan kelompok modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal atau peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapnya. 2) Masyarakat nelayan pengumpul atau bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisi ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar

lokal, pada umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.

Program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat nelayan haruslah bersifat bottom up dan open menu, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran. Pemberdayaan sendiri pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutuskan breakdown dari hubungan antara subyek dengan obyek. Proses ini mementingkan pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirnya daya dari individu yang semula obyek menjadi subyek (yang baru), sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan mencirikan dengan relasi antar subyek dengan subyek lain.

Masyarakat nelayan (Fisher Society) dalam hal ini bukan hanya mereka yang dalam mengatur hidup dan kehidupannya hanya bertarung - berperang melawan benturan-benturan badai siang dan malam hari, hanya sekedar mencari sesuap yang bisa menghidupi keluarganya. Mengingat manusia hidup ditengah-tengah masyarakat, bukan hidup ditengah hutan,

yang mana faktor lingkungan besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam masyarakat. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia nelayan merupakan jawaban atas sebagian persoalan di sektor penangkapan. Fokus pada aspek ini didasari oleh pertimbangan pemikiran sebagai berikut. Pertama, aspek sumberdaya manusia merupakan unsur terpenting dari sebuah organisasi ekonomi. Aspek ini menjadi penentu keberhasilan dan kegagalan dari sebuah kegiatan ekonomi. Kedua, nelayan adalah berposisi sebagai produsen hasil laut.

Keberhasilan usaha nelayan akan menentukan secara signifikan aktivitas ekonomi di sektor pengolahan dan pemasaran, karena itu, jika musim barat tiba (Desember-Februari) dan nelayan tidak melaut, maka hasil tangkapan menurun drastis, sehingga aktivitas ekonomi di sektor pengolahan dan pemasaran juga menjadi lumpuh. Dalam kondisi demikian, sebagian besar masyarakat pesisir akan kehilangan pendapatan. Ketiga, sebagai pelaku usaha, nelayan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelastarian ekosistem sumber daya laut.

Kerusakan ekosistem akan berpengaruh besar terhadap penurunan hasil tangkapan. Karena itu, harus dihindari kegiatan penangkapan yang merusak ekosistem. Tugas dan tanggung jawab sosial-ekonomi nelayan sangat berat dan sekaligus mulia, karena ia menjadi pinjaman kelangsungan hidup keluarganya dan masyarakatnya.

Pemerintah perlu mencari suatu pendekatan yang tepat dan dituangkan dalam sebuah konsep yang mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Pendekatan pembangunan ekonomi yang mulai dari pedesaan, dengan memadukan budaya masyarakat yang ada di pedesaan, kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang perlu kita kemas kembali dipadukan dengan konsep ekonomi yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Pembinaan manusia adalah strategi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat kecil melalui pengembangan SDM. Strategi ini meliputi:

1. Investasi pada modal manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Peningkatan kapasitas organisasi dan kelompok baik formal maupun informal.
3. Memperluas dan mengintegrasikan mandat organisasi dan kelompok sehingga efisiensi dapat tercapai.
4. Memperbaiki budaya/etos kerja.
5. Menghilangkan sifat dan mental negatif yang memasung produktivitas dan menghambat pembangunan. Pembinaan lingkungan merupakan strategi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pesisir melalui perbaikan lingkungan tinggal, lingkungan dan prasarana produksi serta meningkatkan peran masyarakat dalam menata dan mengelola lingkungan hidupnya.

2.5 Definisi Nelayan

Pengertian nelayan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang atau masyarakat yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan. Sedangkan menurut UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, Nelayan (Standar Statistik Perikanan) adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya atau tanaman air.

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau pun budi daya. Mereka pada umumnya bermukim dipinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya dalam (Imron, 2003: 68).

Sesungguhnya nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi pemilihan alat tangkap nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buuruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya, nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain (Mulyadi, 2005:7).

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan. Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jarring, menyangkut alat-alat perlengkapan ke dalam perahu atau pun kapal tidak di masukan sebagai nelayan, tetapi ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkapan dikatakan sebagai nelayan, walaupun mereka secara langsung melakukan penangkapan. Berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan.

1. Nelayan Subsisten (*subsisten fishers*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
2. Nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.
3. Nelayan rekreasi (*recreational/sport fishers*), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau olahraga.
4. Nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestic maupun pasar ekspor. Kelompok nelayan ini dibagi dua, yaitu nelayan skala kecil dan nelayan skala besar.

Jadi disimpulkan semua nelayan yang mencari ikan tidak untuk dijual dan dipasarkan ada beberapa sebaian nelayan mencari ikan untuk

kebutuhan sendiri, ada sebagian hanya untuk kesenangan akan hobinya dalam mencari ikan. Akan tetapi nelayan yang benar-benar dalam memasarkan ikannya yaitu nelayan komersial yaitu nelayan yang mencari ikan untuk dijual.

Dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan memberi peluang kepada nelayan supaya terlepas dari kemiskinan struktural ada strategi yang harus diperhatikan, yaitu (Suyanto,2003) :

1. Sejak awal harus disadari bahwa upaya pemberdayaan nelayan tradisional tidak mungkin dilakukan hanya dengan cara mentransplantasikan teknologi modern kepada kelompok nelayan tradisional secara top down. Pemberdayaan nelayan seyogyanya mempertimbangkan dan bahkan bertumpu keberadaan pranata sosial budaya di masing-masing komunitas lokal nelayan tradisional.
2. Apapun bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan tradisional seyogyanya tidak berorientasi pada kepentingan jangka pendek, sekedar menekankan kepada efisiensi pengembalian dana. Padahal semestinya harus berorientasi pada pemupukan investasi sosial yang berjangka panjang dan bersifat strategis.
3. Memberdayakan dan meningkatkan kadar kekenyalan, serta sekaligus mengurangi kadar kerentanan nelayan tradisional yang miskin dengan cara mendorong terjadinya proses diversifikasi hasil tangkapan dan diversifikasi non perikanan

4. Berusaha menurangi kadar kerentanan keluarga nelayan tradisional dengan cara meningkatkan daya tahan dan nilai tawar dari produk yang mereka hasilkan.
5. Pemberdayaan perempuan dan lansia mendukung proses penguatan penyangga ekonomi keluarga nelayan tradisional. Di lingkungan komunitas nelayan, sudah lazim terjadi ada semacam pembagian kerja, bahwa lelaki bertugas mencari ikan di laut, sedangkan peran perempuan cenderung pada tahap pengolahan dan pemasaran ikan hasil tangkapan.
6. Bagaimana memutus mata rantai eksploitasi yang selama ini merugikan posisi nelayan tradisional. Caranya, tidak semata-mata mengandalkan kebijakan regulatif dari pemerintah atau pemerintah daerah, tetapi yang utama harus bertumpu pada pemberdayaan komunitas nelayan tradisional itu sendiri sebagai sebuah kelompok sosial.
7. Perlu disadari bahwa yang namanya nelayan atau komunitas desa pantai, sebetulnya bukanlah kelompok yang homogen. Buruh nelayan dan nelayan tradisional umumnya adalah golongan masyarakat pesisir yang berada pada lapisan sosial paling bawah, yang dalam banyak hal memiliki kerentanan, ketidakberdayaan, kelemahan jasmani, kemiskinan, dan keterisolasian yang lebih parah dibandingkan dengan nelayan modern
8. Sebagai tindak lanjut dari program perlindungan dan pemberdayaan keluarga nelayan tradisional melalui program pengembangan diversifikasi usaha.

Pada dasarnya kegiatan pemberdayaan diharapkan memberikan kontribusi besar untuk (Kusnadi, 2007:85):

1. Membangun kemandirian masyarakat nelayan
2. Meningkatkan *bargaining position* terhadap pemerintah (negara) dan pihak swasta dalam menentukan kebijakan pembangunan kawasan
3. Memperkuat akses ekonomi-politik kelembagaan sosial masyarakat beserta jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan (*good governance*)

2.6 Pengertian Tempat Pelelangan Ikan

Tempat Pelelangan Ikan merupakan suatu wadah tempat berlangsungnya penjualan hasil-hasil penangkapan ikan dari laut/perairan lain yang dilakukan dihadapan orang banyak dengan harga beratas-atasan. Fungsi Tempat Pelelangan Ikan adalah untuk menyalurkan dan menkoordinir sistim penjualan ikan hasil tangkapan nelayan kepada pembeli dengan sistim lelang.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kalau di tinjau dari manajemen operasi, maka TPI merupakan tempat penjual jasa pelayanan antara lain sebagai tempat pelelangan, tempat perbaikan jarring, tempat perbaikan mesin dan lain sebagainya. Disamping itu TPI merupakan tempat berkumpulnya nelayan dan pedagang-pedagan ikan atau pembeli ikan dalam rangka mengadakan transaksi jual beli ikan. Nelayan ingin menjual hasil tangkapan ikanya dengan harga sebaik mungkin, sedangkan pembeli

ingin membeli dengan harga serendah mungkin. Untuk mempertemukan penawaran dan permintaan itu, diselenggarakan pelelangan ikan agar tercapai harga yang sesuai, sehingga masing-masing pihak tidak merasa dirugikan.

Pelelangan ikan merupakan suatu kegiatan dimana penjual dan pembeli bertemu dalam suatu tempat (gedung TPI), didalamnya terjadi proses tawar-menawar harga ikan sehingga diperoleh harga yang mereka sepakati bersama dalam proses tawar menawar ini, kualitas ikan akan memegang peranan penting dalam penentuan harga. Pembeli akan memberikan penawaran yang lebih tinggi terhadap ikan memiliki kualitas lebih baik. Meskipun pada awalnya nelayan yang akan mengajukan harga terlebih dahulu “melalui” petugas lelang.

Aktivitas pelelangan ikan di TPI merupakan salah satu aktivitas di suatu pelabuhan perikanan yang termasuk dalam kelompok aktivitas yang berhubungan dengan pendaratan dan pemasaran ikan. Pelelangan ikan memiliki peran yang cukup penting untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pemasaran ikan. Pelelangan ikan adalah suatu kegiatan di tempat pelelangan ikan guna mempertemukan penjual dan pembeli sehingga terjadi tawar-menawar hanya ikan yang disampaikan bersama pelelangan ikan adalah salah satu mata rantai tata niaga ikan.

2.6.1 Sarana Penunjang Pada Tempat Pelelangan Ikan

Adapun sarana penunjang pada tempat pelelangan ikan antara lain:

- a. Lembaga masyarakat (kelompok tani/nelayan) merupakan tempat berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan perikanan.
- b. Tempat pelelangan ikan (TPI) pusat pelayanan pembinaan dan pemasaran hasil perikanan baik tangkap maupun budidaya perikanan serta tempat pengembangan industri perikanan/ pelayanan ekspor.
- c. Industri pengolahan perikanan ialah usaha pengolahan perikanan yang merupakan industri kecil dan rumah tangga, adapun hasil pengolahannya yaitu ikap asap, ikan kering/ asin dan abon.
- d. Lapangan penjemuran jala/ikan merupakan sarana yang digunakan sebagai tempat untuk menjemur jala yang sudah di pakai agar tidak bau amis dan tempat penjemuran ikan.
- e. Pabrik es merupakan sarana yang berfungsi untuk kebutuhan es, agar dapat mempertahankan mutu produksi selama proses panen dan didistribusikan.
- f. Bank dan koperasi merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat peminjaman uang bagi nelayan.
- g. SPBU/SPDN ; sarana untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bakar bagi masyarakat khususnya bagi para nelayan.
- h. Gudang pengepakan/pengolahan merupakan sarana untuk penyimpanan dan pengolah komoditi unggulan yang akan di ekspor.
- i. Penyediaan Benih merupakan sarana menyediakan benih.
- j. *Cold room/cold storage*, merupakan sarana yang berfungsi untuk mendinginkan hasil tangkap agar hasil produksi tetap awet.
- k. *Docking Bengkel*, untuk perawatan dan perbaikan mesin kapal dan kapal-kapal nelayan.

2.6.2 Prasarana Penunjang Pada Tempat Pelelangan Ikan

Adapun Prasarana Penunjang pada tempat pelelangan ikan antara lain:

- a. Jaringan Jalan merupakan salah satu prasarana yang sangat penting. Dengan adanya transportasi jalan maka masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan baik.
- b. Jaringan listrik merupakan utilitas yang berfungsi untuk penerangan rumah tangga, jalan maupun untuk kegiatan lainnya.
- c. Jaringan air bersih utilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- d. Setiap kawasan perlu penyediaan sumber air bersih, pelayanan sumber air bersih baik dari pelayanan PDAM dan dapat menyediakan sendiri melalui sumur gali dan bor.
- e. Jaringan telekomunikasi prasarana ini berfungsi melakukan komunikasi untuk mengetahui informasi .
- f. Jaringan irigasi merupakan merupakan sistem pengairan, yang berfungsi untuk menyuplai air seperti sawah dan tambak.
- g. Dermaga merupakan prasarana yang berfungsi sebagai tempat labuh, bertambatnya kapal penangkap ikan dan membongkar hasil muat hasil tangkapan dan mengisi bahan perbekalan untuk menangkap ikan di laut.

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dari penilaian ini tentang Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Tempat Pelelangan Ikan (TPI), selain merupakan pintu gerbang nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan ikannya, juga menjadi tempat untuk memperbaiki jaring, motor, serta kapal dalam persiapan operasi penangkapan ikan. Tujuan utama didirikannya TPI adalah untuk menarik sejumlah pembeli, sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya sesegera mungkin dengan harga yang layak serta dapat menciptakan perasaan yang sehat melalui lelang murni. Disamping itu secara

fungsional, sasaran yang diharapkan oleh TPI adalah tersedianya ikan bagi kebutuhan penduduk sekitarnya dengan kualitas yang baik serta harga yang wajar. Perbaikan manajemen pengelolaan dalam tempat pelelangan ikan diharapkan mampu mensejahterakan nelayan serta menjadikan tempat pelelangan ikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Untuk mengetahui sejauh mana manajemen pengelolaan tempat pelelangan ikan di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima peneliti menggunakan teori POAC G.R Terry (2008:17): *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*.

Karena untuk menjadikan sebuah tempat pelelangan ikan yang ideal diperlukan rencana (*planning*) yang baik untuk dijadikan penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Kemudian *Organizing* (pengorganisasian) menentukan, mengelompokkan, dan mengatur bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. *Actuating* (pengarahan) mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dalam mengelola tempat pelelangan ikan dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. *Controlling* (pengendalian) pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah

dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat diselenggarakan maka untuk mempermudah memahami alur berpikir peneliti menggambarkan kerangka berpikirnya sebagai berikut seperti pada gambar dibawah ini:



Perbaikan Manajeen Pengelolaan Tempat Pelelangan
Ikan Di Desa Bugis Kec. Sape Kab. Bima

Tempat pelelangan menjadi pusat kegiatan
lelang dari hasil tangkapan nelayan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Deskriptif kualitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat. Itulah alasan mengapa peneliti mengambil penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Arikunto (2002: 136) metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian mengenai Manajemen Tempat Pengelolaan Ikan Di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, sedangkan bentuknya yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif ini berusaha untuk mencari atau menggali informasi mengenai permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Bogdan dan Taylor dalam Maleong (2006: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjelaskan tempat (lokus) penelitian, serta alasan memilih lokasi penelitian tersebut. Lokasi penelitian mengenai Manajemen Pengelolaan Tempat pelelangan ikan di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Desa Bugis dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian ini karena memiliki perairan laut dan juga memiliki potensi perikanan yang sangat besar, potensi ini dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang besar apabila dikelola dengan baik. Salah satu cara untuk mengelolah hasil kelautan untuk di Desa Bugis yaitu mendirikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk mengelolah hasil ikan tangkap. Salah satu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di Desa Bugis ialah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Bugis yang berada dibawah UPT Kecamatan Sape. Fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Tempat Pelelangan Ikan di Desa Bugis Kecamatan Sape. Adapun waktu penelitian ini yaitu bulan Februari 2021.

3.3 Instrumen Penelitian

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2009: 60-61), dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai

instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditemukan secara pasti yang jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya untuk mencapainya.

3.4 Data Informan Penelitian

Pada penelitian mengenai Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, peneliti menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan metode penentuan informan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Adapun informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah pengelola tempat pelelangan ikan Desa Bugis baik itu manajer tempat pelelangan ikan dan instansi yang terlibat dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan serta pihak-pihak lain yang terkait dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Adapun SKPD yang tersebut diantaranya UPT PPI/TPI Kecamatan Sape.

Untuk keabsahan data dan untuk menggali secara mendalam mengenai penelitian ini maka peneliti pun mengambil informan dari juragan nelayan Desa Bugis, serta nelayan-nelayan yang ada di Desa Bugis

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperang serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan masih bersifat mentah karena belum diolah.

Data ini diperoleh melalui:

a. Observasi atau pengamatan

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek-obyek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut melakukan pencatatan-pencatatan data-data yang di peroleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian.

b. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2009: 72) mendefinisikan interview atau wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide mulalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam

suatu topic tertentu. Esteborg mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu, wawancara terstruktur, semistruktur dan tidak terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang resmi dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen yang diperoleh tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah:

- a. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.
- b. Recorder: untuk merekam semua percakapan karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang telah diberikan oleh informan.
- c. Handphone camera: untuk memotret atau mengambil gambar semua kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan dari suatu penelitian.

3.6 Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Data primer diambil langsung

dari informan penelitian. Dalam hal ini data primer ini diambil melalui wawancara (*interview*).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung dari subyek penelitiannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui data-data dan dokumen-dokumen yang relevan mengenai masalah yang diteliti. Data-data tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Seperti dinyatakan oleh Miles and Huberman dalam Sugiyono (2009: 87), bahwa kegiatan analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu *data reduksi* (penerikan kesimpulan dan verifikasi) (Silali 2009: 339):

1. *Data reduction* (Reduksi data)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan di verifikasi. Reduksi data atau proses transformasi

berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir tersusun lengkap.

2. *Data Display* (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penerikan kesimpulan dan tindakan melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus di lakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang dapat dari penyajian-penyajian tersebut. penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing and verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah dipeneliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interatif, hipotesis atau teori.

